

**KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN
PEDAGANG KAKI LIMA BERBASIS PADA
KEARIFAN LOKAL
(Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta)**

Oleh : Dian Esti Nurati
Unisri Surakarta

Abstract

A study related to the policy of organization of Informal Traders in Surakarta which is based on local wisdom, related to the condition in the field where Surakarta local government in communicating the policy as the implementation of the minimum organization of Informal Traders. Through observation and interview toward implementer, policy targets, and stake holders, such as Surakarta local legislative council, NGO, and Informal Traders observers. Based on the developmental phase of implantation model by George Edward III, the communication process of policy communication in the organization of Informal Traders in Surakarta consists of four factors: (1) Communication; (2) Resource; (3) Disposition and; (4) Bureaucracy. Implementation model by Grindle (1980) related to two aspects; policy contents and policy contexts, is considered having minimal impact on its application. Based on the result of the analysis, this research proves that policy communication helps people finding new norms and harmonization in the policy implementation. Policy communication also helps the implementer and the target of policy to cooperate in achieving the purpose of policy. Local wisdom as the basis of organizing and ordering Informal Traders based on socio-cultural approach, centered on the *nguwongke-uwong* characteristic; where human are appreciated, respect each other, help each other to create togetherness and balance. Local wisdom always invests and realizes communality, deliberation, dialog, and two way communication; therefore in the organization of Informal Traders in Surakarta, harmony was realized through cultured Informal Traders organization.

Keywords: Communication Public Policy, Organization of Informal Traders, Local Wisdom

Latar Belakang

Pemerintah Kota Surakarta dalam program penataan dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilaksanakan dengan sistem pendekatan. Dari semua unsur pendekatan, baik secara personal, formal, kelembagaan dan lingkungan, diupayakan sedemikian rupa agar tujuan-tujuan yang menjadi target pemerintah kota bisa tercapai.

Kebijakan yang dilakukan Pemkot Surakarta sangat baik untuk memikirkan pedagang kecil, meski modal terbatas, pasar dan kaki lima di Solo paling banyak merekrut tenaga kerja. Mereka juga penyumbang terbesar pendapatan asli daerah.

Pengalaman sebelumnya menggambarkan bahwa tiga wali kota sebelumnya belum berhasil melaksanakan penataan PKL di kota Solo. Sikap para pedagang kaki lima sebelumnya tidak kooperatif. Dari pengalaman terdahulu munculah gagasan untuk mengadakan pendekatan kepada para pedagang, mereka harus diajak komunikasi secara persuasif.

Menurut Mulyanto (2007), PKL adalah termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (*profit*) layaknya sebuah kewirausahaan (*entrepreneurship*). PKL mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya agar mendapatkan keuntungan. PKL adalah manajer tunggal yang menangani usahanya mulai dari perencanaan usaha, menggerakkan usaha sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahanya, padahal fungsi-fungsi manajemen tersebut jarang atau tidak pernah mereka dapatkan dari pendidikan formal.

Manajemen usahanya berdasarkan pada pengalaman dan alur pikir mereka yang otomatis terbentuk sendiri berdasarkan arahan ilmu manajemen pengelolaan usaha, hal inilah yang disebut "*learning by experience*" (belajar dari pengalaman). Kemampuan manajerial memang sangat diperlukan PKL guna meningkatkan kinerja usaha mereka, selain itu motivasi juga sangat diperlukan guna memacu keinginan para PKL untuk mengembangkan usahanya.

Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan dan pengelolaan PKL, selama ini hanya memperhatikan PKL dari aspek fisik saja seperti adanya relokasi dan pembuatan *shelter-shelter* namun dalam hal manajerial dan pengelolannya dinilai sangat kurang. Dalam hal ini optimalisasi sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surakarta No.3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima perlu dilakukan, karena Perda ini sangat berpengaruh terhadap sektor PKL.

Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya komunikasi yang lebih aktif untuk menyampaikan isi kebijakan penataan dan pengelolaan PKL kota Surakarta. Komunikasi perlu digiatkan diantara para implementor, serta komunikasi antara implementor dengan sasaran kebijakan, komunikasi antara para sasaran kebijakan (PKL), juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam penataan PKL itu sendiri, yakni pihak LSM dan Masyarakat pengamat PKL.

Inilah yang menjadi *problem statement* dan dalam kerangka inilah dipandang perlu melakukan penelitian tentang Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal di Kota Surakarta.

Melalui penelitian ini ingin diketahui bagaimana kebijakan yang akan di implementasikan terlebih dahulu dikomunikasikan atau diinterpretasikan kemudian disosialisasikan, sehingga tergambaran proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*).

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut.

Dengan penyampaian informasi kebijakan publik diharapkan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik, agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Penyampaian informasi komunikasi kebijakan publik perlu dilandasi dengan beberapa macam dimensi, yaitu dimensi transformasi, dimensi kejelasan serta dimensi konsistensi.

Adapun fokus penelitian ini berdasarkan pada, *Pertama*, Proses Komunikasi Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Dalam hal ini fokus penelitian diarahkan kepada proses komunikasi kebijakan yang meliputi : Aktifitas interpretasi atau penjelasan

kebijakan kedalam bahasa yang lebih operasional, mudah dipahami, dapat dilaksanakan dan dapat diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Kedua peran kearifan budaya lokal dalam proses komunikasi kebijakan untuk menciptakan pengelolaan PKL yang berbudaya. Peran Bkearifan budaya lokal yang dimaksud adalah kepatuhan terhadap pranata sosial yang dibangun dalam budaya yang dimilikinya, misalnya budaya “gotong-royong” merupakan sebuah kesepakatan sosial bagi masyarakat pendukungnya untuk melakukan kerjasama sosial demi kepentingan bersama. Penataan dengan menjalin komunikasi dua arah, antara PKL dan Pemerintah Kota Surakarta bersama-sama berupaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi PKL dalam penataan dan pengelolaan. Pencapaian kebijakan dengan pertemuan, dialog dan musyawarah, dengan prinsip “*nguwongke*”, atau memanusiaikan.

Landasan Teori

No	Tokoh/Institusi	Theoretical Atribut	Kontribusi Dalam Penelitian
1.	Laswell & Kaplan Islamy, 2002 Anderson & Wahab, 2002 Dye, 1978	Kebijakan Publik	(1)Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat, (2) hakikat kebijakan publik atau kebijakan pemerintah (<i>state</i>) ialah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk kepentingan rakyat (<i>publik interest</i>), (3) Kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat, keinginan dan tuntutan-tuntutan (<i>demands</i>) dari rakyat.
2.	William N Dunn, 1994 Ripley, 1985	Proses Kebijakan Publik	Penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni; (1) membangun persepsi di kalangan <i>stakeholders</i> bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2) Membuat batasan masalah; dan (3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.
3.	William N Dunn, 1994	Elemen Sistem Kebijakan	Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan, dan Lingkungan Kebijakan
4	George E Edward III, 1980	Model Implementasi Kebijakan	(1).Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; (4) Struktur Birokrasi.

5	Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno , 2007.	Model Implementasi Kebijakan	Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan: a.Kompetensi dan ukuran staf suatu badan b.Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana c.Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif) d.Vitalitas suatu organisasi e.Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja organisasi kerja komunikasi “terbuka” dan “tertutup” secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara “terbuka” tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi f.Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan ini.
6	Merille S Grindle (1980)	Model Implementasi Kebijakan	Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) siapa pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasinya adalah: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) kepatuhan dan daya tanggap.
7	Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1987)	Model Implementasi Kebijakan	Peran penting dari implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar: (1) mudah tidaknya masalah yang digarap dikendalikan; (2) kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; (3) pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut
8	George E Edward III, 1980	Model Implementasi Kebijakan	(1).Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; (4) Struktur Birokrasi.
9	George E Edward	<i>Standard</i>	Struktur birokrasi (<i>bureaucratic structure</i>)

	III, 1980	<i>Operating Procedure</i> (SOP)	mencakup dimensi fragmentasi (<i>fragmentation</i>) dan standar prosedur operasi (<i>standard operating procedure</i>). Dimensi fragmentasi (<i>fragmentation</i>) menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalannya komunikasi.
10	Goldhaber, 2004.	Komunikasi Kebijakan/ Komunikasi Organisasi	Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Selain itu, juga dikatakan bahwa komunikasi organisasi mengandung tujuh konsep kunci yaitu proses, pesan, jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian.
11	Solichin Abdul Wahab, 2005	Komunikasi Kebijakan	Pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara. Sehingga komunikasi kebijakan juga tidak akan terlepas dari permasalahan dalam komunikasi organisasi
12	Pace dan Faules, 2000	Iklm Komunikasi	Inventaris Iklm Komunikasi (IIK) yang dirancang untuk mengukur enam " pengaruh komunikasi " atau dimensi komunikasi, yang ditentukan dalam suatu model yang berasal dari analisis " iklim ideal yang berhubungan dengan pengelolaan "
13	Redding (dalam Pace dan Faules, 2000)	Iklm Komunikasi Organisasi	Iklm komunikasi organisasi merupakan fungsi kegiatan yang terdapat dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa organisasi tersebut mempercayai anggotanya dan memberi kebebasan dalam mengerjakan tugas-tugas ; menyediakan informasi yang terbuka dan cukup tentang organisasi ; mendengarkan dengan penuh perhatian serta memperoleh informasi yang dapat dipercayai dan terus terang dari anggota organisasi ; secara aktif memberi penyuluhan kepada para anggota organisasi.
14	Dirjen Kesbangpol Depdagri, 2007).	Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1: Budaya Daerah	Budaya daerah sebagai "suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

15	Mulder, (2001: 164)	Wujud Kebudayaan.	Wujud kebudayaan terdapat tujuh faktor : 1. Silaturahmi; 2. Spiritualisme; 3. Peran seluruh elemen masyarakat; 4. Intensitas pembelajaran dan pengenalan budaya Jawa; 5. Memberikan stimulan yang dapat mengimbangi kemajuan teknologi; 6. Merevitalisasi adat-istiadat; 7. Menciptakan komunikasi yang sehat di masyarakat.
16	Koentjaraningrat, (1986: 203-204).	Budaya Lokal	Budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya etnik/ subetnik. Setiap bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki kebudayaan yang mencakup tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian (Koentjaraningrat, 1986: 203-204).
17	Smiers, (2008: 383).	Kearifan Lokal	Mengimplementasikan kearifan lokal untuk membangun masyarakat madani. Walaupun kearifan lokal terdapat dalam kebudayaan lokal yang dijiwai oleh masyarakatnya, namun sejalan dengan perubahan sosial kultural yang demikian cepat kebudayaan lokal yang menyimpan kearifan lokal sebagaimana sinyalemen para ahli sebagian telah tergerus oleh kebudayaan global.
18	Suyatno Kartodirdjo (1994)	Budaya Lokal	Kesadaran dan ketahanan kultural menjadi pilar yang sangat kuat untuk membangun masyarakat madani yang berbasis kearifan lokal.
19	Rahyono (2009)	Budaya Lokal	Kebudayaan yang diciptakan memiliki visi keadilan serta berperan untuk menciptakan suasana ketenteraman dunia " <i>memayu hayuning bawana</i> " (menciptakan suasana ketenteraman dunia).
20	Sutrisno (2009)	Budaya Lokal	Kepatuhan terhadap pranata sosial yang dibangun dalam budaya yang dimilikinya, misalnya Budaya "gotong-royong" merupakan sebuah kesepakatan sosial bagi masyarakat pendukungnya untuk melakukan kerjasama sosial demi kepentingan bersama. Pencapaian kebijakan dengan pertemuan, dialog dan musyawarah (prinsip " <i>nguwongke</i> "). " <i>Kirab Boyongan</i> " Dalam konteks budaya Jawa (budaya lokal) sesuatu atau orang yang dikirab dan diboyong, adalah sesuatu atau orang yang dihormati, berpindah menuju tempat yang lebih baik dengan cara yang terhormat.

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif. Menurut Locke, Spirduso, and Sliverman (1987) dalam Creswell, 2003: 198 bahwa *'the intent of qualitative research is to understand a particular social, event, role, group, or interaction. It is largely an investigative process -where the researcher gradually makes sense of a social phenomenon by contrasting, comparing, replicating, cataloguing and classifying the object of study* (Miles and Huberman, 1984 dalam Creswell, 2003:198).

Senada dengan itu Sugiyono (2007:292) menyatakan bahwa pemilihan metode penelitian kualitatif didukung oleh alasan bahwa data dalam situasi sosial yang kompleks dan dinamis tidak memungkinkan dijaring dengan metode penelitian kuantitatif, kemudian peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, dan teori.

Penelitian kualitatif paling tepat untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat eksploratif dan evaluatif, karena jenis dan desain penelitian pada pendekatan naturalistic pada umumnya relative lebih leluasa dalam menjaring dan menetapkan variabel- variabel penelitian (Lincoln & Guba, 1989).

Pertimbangan mempergunakan metode kualitatif dalam penelitian ini juga karena sifat pendekatan kualitatif yang lentur, dengan mengikuti pola pemikiran yang bersifat empirical inductive, segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di lapangan.

Informan penelitian terdiri dari: a) Institusi Pengelola PKL Kota Surakarta b). Institusi Dinas Pasar Kota Surakarta; c) Institusi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta; d) Paguyuban PKL; e) Lembaga Sosial Masyarakat yang memiliki minat di bidang pengelolaan PKL; f). Tokoh masyarakat setempat yang diharapkan dapat memberi informasi tentang kondisi dan perkembangan PKL Kota Surakarta.

Alasan pemilihan Informan tersebut diatas adalah, orang-orang tersebut berada dalam latar penelitian yang bermanfaat untuk memberikan informasi situasi dan kondisi latar penelitian, serta memiliki banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan yang dipilih "berkewajiban" secara sukarela menjadi tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya memberikan pandangan sebagai orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat (Lexy J. Moleong 2002: 90).

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi Kebijakan Penataan dan Pengelolaan PKL Surakarta

Komunikasi kebijakan (sosialisasi) dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dalam mengimplementasikan kebijakan. Komunikasi kebijakan juga dapat membantu implementor dan sasaran target untuk saling bekerjasama mencapai tujuan kebijakan.

Pelaksana kebijakan (policy implementors) yang terdiri dari, Dinas, Badan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Kota; Sektor swasta (privat sectors); Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Komponen Masyarakat. Para implementor sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan.

Isi Kebijakan menurut Merille S Grindle (1980) adanya kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program kebijakan, sumber daya yang dikerahkan. Keseluruhan isi kebijakan tersebut oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta beserta DPRD, telah dituangkan didalam Peraturan Daerah Nomer 3 tahun 2008, yang kemudian dipergunakan sebagai pedoman dalam implementasi kebijakan oleh para implementor kebijakan.

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008 tentang penataan dan pengelolaan PKL. Sebagai persiapan dalam pelaksanaan kebijakan maka para implementor terlebih dahulu memahami kebijakan pengelolaan PKL tersebut dengan melakukan interpretasi. Interpretasi dilakukan oleh para implementor, yaitu merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*).

Aktivitas interpretasi kebijakan tadi, tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan agar supaya seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tadi.

Kebijakan ini perlu dikomunikasikan (disosialisasikan) agar mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi, tidak saja mereka menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan, tapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi.

- (1) “ Paguyuban PKL memiliki peran yang strategis baik bagi pemerintah Kota maupun bagi anggota PKL itu sendiri. PKL yang terwadahi dalam paguyuban mampu menerima dan menyampaikan permasalahan penataan dan pengelolaan PKL secara terorganisasi. Tercapainya program penataan dan pengelolaan PKL oleh pemerintah dikarenakan adanya kegiatan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan tersebut kepada paguyuban PKL. Pemerintah bersama-sama PKL bisa “nyambung” di dalam memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut. Walaupun terkadang timbul terjadinya perbedaan pendapat, hal tersebut bisa diminimalisir karena tujuan utamanya adalah mencari pemecahan masalah yang tepat, saling memberi dan saling menerima antara Pemerintah Kota dan Paguyuban PKL Surakarta”. (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan PKL Kota Surakarta, Didik Anggono)
- (2) Mengingat begitu banyaknya kantong-kantong PKL yang terdapat di kota Surakarta ini, untuk menata dan mengelolanya pemerintah kota membutuhkan strategi penataan dan pengelolaan yang baik secara bertahap dan kontinyu. Sehingga dengan demikian dibutuhkan pula komunikasi yang secara terus menerus, antara pemerintah kota dan paguyuban PKL, agar terjalin kesamaan pendapat. Berikut gambaran tentang tahapan penataan dan pengelolaan PKL kota Surarta.

Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta juga Seksi Penataan dan Pengelolaan PKL menyusun konsep tentang kawasan PKL dengan model dibentuknya kantong-kantong PKL melalui program relokasi, shelter, gerobak dan tenda. Program tersebut juga sangat dipertimbangkan dengan melihat kondisi di lapangan, misalnya bagaimana tempat berdagang PKL tersebut, apa jenis dagangannya, kapan waktu operasionalnya dilakukan , pagi, siang atau malam.

Dalam penataan secara menyeluruh terhadap PKL baik itu dari aspek fisik maupun manajemen, pemerintah kota melakukan optimalisasi Perda Kota Surakarta No.3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL, karena Perda ini sangat berpengaruh terhadap sektor PKL.

Kebijakan Penataan dan Pengelolaan PKL Kota Surakarta

No.	Kebijakan/ Program	Keterangan
1	Gladag Langen Boga (Galabo)	Galabo menjadi salah satu ikon kota Surakarta sebagai kawasan kuliner. Maka jika PKL dikemas secara menarik dapat dijadikan <i>sebagai potensi ekonomi maupun potensi wisata</i> . Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya promosi yang tepat.
2	Beteng Utara	Sebagai PKL Galabo siang, keberadaannya melayani kebutuhan kuliner untuk para pedagang batik yang mencari dagangan di BTC, PGS dan Pasar Klewer. Pendatang dari seluruh wilayah Jawa Tengah maupun Indonesia
3	Car Free Day	PKL Car Free Day menempati Solo City Walk, dengan penataan jalur pedestrian selebar 5 meter disepanjang jalan Slamet Riyadi mulai dari kawasan Gladak sampai Purwosari.
4	Shelter Manahan	80 PKL yang menempati 80 kios dengan luas lahan 200 meter. Shelter PKL Manahan yang semula dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Solo akan dilimpahkan ke UPTD Kuliner Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo.
5	Sunday Market Manahan	Terdapat 1.500 pedagang yang beraktivitas. Pemerintah Kota Solo berencana menata dan menertibkan pedagang di Sunday Market yang berjualan di area taman. Pemkot tak ingin pelanggaran itu semakin meluas dan merusak citra Manahan sebagai hutan kota. Pendapatan asli daerah (PAD) dari Sunday Market juga tak seimbang dengan biaya perawatan taman jika kondisi itu masih berlarut-larut.
6	Jl. dr. Rajiman	Relokasi 89 PKL di Jalan Dr Radjiman, dipindahkan ke empat pasar, yakni Pasar Jongke, Pasar Ayu, Kadipolo dan Penumping. Pemilihan pasar sesuai dengan permintaan pedagang sendiri.
7	Pasar Burung Depok	PKL yang direlokasi ke Pasar Burung dan Ikan Hias memiliki konsep belanja sambil berekreasi yang menjadi unggulannya.

Sumber: Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Kota Surakarta 2013

Peran Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan PKL.

Dalam proses penyampaian pesan komunikator (Pemerintah Kota Surakarta) kepada komunikan (PKL) tersebut harus memperhatikan kondisi sosial budaya yang melatarbelakanginya serta hambatan-hambatan yang berupa bahasa dan sikap perilaku, dimana akan membawa pengaruh terhadap dukungan dari kelompok sasaran, baik dari segi positif maupun negatif yang bertujuan memperlancar pelaksanaan kebijakan sesuai yang telah ditargetkan dalam mencapai tujuan.

“Pemerintah Kota Surakarta selalu mempergunakan unggah-ungguh (sopan santun/etika) dalam menata PKL Surakarta. Hal ini kita tanamkan pada seluruh pegawai di Pemerintah Kota Surakarta. Dalam forum pertemuan resmi yaitu sosialisasi kebijakan maupun dalam tatap muka informal. Mereka kita ajak dialog setiap hari untuk menyampaikan program penataan dan menerima pemikiran-pemikiran, kebutuhan dan

keinginan para PKL. Hubungan kita sangat dekat karena hampir setiap hari kita turun ke lapangan untuk menemui PKL, baik yang sudah tertata maupun yang akan kita tata. Kegiatan penataan yang dilakukan Pemerintah Kota kadang juga menemui hambatan, butuh waktu agak panjang dari jadwal yang ditentukan, hal tersebut karena untuk menyamakan persepsi dalam memahami aturan yang diberikan kepada para PKL” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengelola Pasar, Subagyo, pada tanggal 20 Mei 2013).

Alternatif Model Pengelolaan PKL Kota Surakarta.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang mendalam dengan informan, maka alternatif model Komunikasi Kebijakan dalam Pengelolaan PKL Kota Surakarta yang Berbasis pada Kearifan Lokal adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi Kebijakan Pengelolaan PKL Kota Surakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, yang didasari oleh kearifan lokal, berupa sosialisasi, dialog (komunikasi dua arah) dan musyawarah. Hal tersebut dilakukan terutama oleh Pemerintah Kota dalam hal ini yakni, para pihak yang diserahi mengelola PKL , yaitu UPTD Kuliner dan UPTD Sarana dan Prasarana Disdikpora, juga Dinas Koperasi. Dari kegiatan tersebut diharapkan untuk memperoleh peningkatan kualitas komunikasi kebijakan pengelolaan PKL, secara efektif dalam waktu yang relatif singkat semua informasi yang hendak disampaikan mampu mencapai sasaran target, sehingga memudahkan pengelola menata dan mengelola PKL dengan lebih profesional.
2. Kepemimpinan Penguasa yang diperankan oleh Pemerintah Kota Surakarta, dengan mengacu pada adanya human dignity, yaitu prinsip “*nguwongke*” atau memanusiakan, pada akhirnya akan memudahkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang dilakukan.
3. Isi Kebijakan dalam penataan dan pengelolaan PKL, dengan melaksanakan program pengelolaan dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2008, dilaksanakan dengan mempergunakan sumber daya yang diberi wewenang dalam hal ini, diharapkan perubahan di dalam penataan dan pengelolaan akan mencapai tujuan yang telah ditargetkan.
4. Konteks Implementasi dalam pengelolaan PKL dengan melakukan kegiatan “*blusukan*” yang tujuannya adalah menggali informasi, menjalankan kerjasama, menampung, menginspirasi dan mewujudkan keinginan serta kebutuhan antara Pemerintah Kota Surakarta dan Paguyuban PKL Surakarta, akan bisa diwujudkan dengan lebih mudah.

Kesimpulan

Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta.

(1) Komunikasi Kebijakan Para Impelementor

Pelaksana kebijakan (policy implementors) yang terdiri dari, Dinas, Badan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah; Sektor swasta (privat sectors); Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Komponen Masyarakat. Para implementor sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan.

Interpretasi dilakukan oleh para implementor, yaitu merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*).

Kegiatan sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan PKL tersebut terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta secara terjadwal, selain pada kalangan implementor sendiri, antara lain Pemerintah Kota dalam hal ini otoritas Dinas Pengelola Pasar, beserta Bidang Pengelola PKL, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), UPTD Kuliner Disperindag (pengelola PKL Galabo), UPTD Sarana Prasarana Disdikpora (pengelola PKL Sunday Market di Manahan).

Kegiatan komunikasi kebijakan paling utama dalam pengelolaan PKL ini adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak implementor dengan sasaran targetnya yaitu Paguyuban PKL Surakarta yang jumlahnya kurang lebih sampai saat ini anggotanya mencapai 5.817 orang.

(2) Komunikasi Kebijakan Pelaku Kebijakan dan Paguyuban PKL.

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi kebijakan dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dalam mengimplementasikan kebijakan. Komunikasi kebijakan juga dapat membantu implementor dan sasaran target untuk saling bekerjasama mencapai tujuan kebijakan.

Paguyuban PKL merupakan wadah dari kegiatan yang mereka lakukan, termasuk bagaimana mereka menyatukan kepentingan-kepentingan bersama mereka, dan menyatukan langkah untuk mencapai tujuan bersama, sehingga perhatian organisasi/ kelompok/ paguyuban penting bagi para pedagang kaki lima, khususnya kepada anggota baru perlu dioptimalkan, termasuk melakukan pemberdayaan. Paguyuban PKL dapat menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Kota untuk mengorganisir para anggotanya, agar program-program pemerintah yang berkaitan dengan PKL dapat tersampaikan.

Sosialisasi tentang isi kebijakan pengelolaan PKL telah dilakukan secara terjadwal oleh Pemerintah Kota Surakarta kepada seluruh Paguyuban PKL Surakarta. Dalam program sosialisasi tersebut kemudian muncul gagasan-gagasan baru, bagaimana penataan selanjutnya dilakukan sesuai dengan konsep yang telah disusun, PKL selalu diberikan kesempatan untuk memberikan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Pihak LSM dan Komponen masyarakat Surakarta lainnya juga berperan dalam memberikan pemikiran-pemikiran untuk penataan dan pengelolaan PKL Surakarta. Berdasarkan pengamatan yang mereka lakukan, maka pemikiran tersebut merupakan masukan yang bermanfaat bagi penataan dan pengelolaan PKL Surakarta.

Peran Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta.

Penataan dan pengelolaan PKL Kota Surakarta, yang berbasis pada kearifan budaya lokal mengajarkan para warganya untuk memahami peran sesama manusia dan lingkungan alam dalam mewujudkan kedamaian dan ketentraman *memayu hayuning bawana* “menciptakan suasana ketentraman dunia”, juga mengajarkan kesadaran kepada siapapun yang memperoleh peran sebagai pemimpin untuk “*manjing ajer-ajer*” lebur menyatu bersama warganya.

Seorang pemimpin selayaknya multiperan sesuai dengan proporsi ditempat ia berada “*ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*” saat berperan sebagai pemuka, pemimpin memberikan keteladanan, saat berada ditengah-tengah

masyarakat pemimpin membangkitkan semangat, saat berperan sebagai pengikut, seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan kekuatan.

Kebijakan pemerintah yang ditetapkan menjadi sebuah kesepakatan bersama. Sebuah kebijakan menjadi milik bersama baik pihak pemerintah maupun warga masyarakat yang menjalani aturan dalam kebijakan tersebut. Sikap memaksakan kehendak pribadi, baik yang ada pada para PKL, yang biasanya semauanya sendiri menempati lokasi yang tidak pada tempatnya, dan pada pihak pemerintah sendiri yang mementingkan tercapainya kebijakan, diluluhkan dalam pertemuan-pertemuan dialog yang *nguwongke*.

Kegiatan "*blusukan*" yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta sangat efektif untuk mendekat "*tanpa jarak*" kepada para PKL, khususnya untuk menggali informasi, mengetahui keinginan-keinginan mereka, menyatukan gagasan atau pemikiran, bagaimana sebaiknya pengelolaan dan penataan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai target pelaksanaan kebijakan.

Dalam penataan PKL, Pemerintah Kota Surakarta mengajak warga masyarakatnya untuk bersedia ikut memikirkan. Pemerintah Kota sangat terbuka untuk menerima masukan setiap saat. Tidak ada perbedaan strata sosial antara warga masyarakat dengan pemimpinnya. Masyarakat diajak berpikir cerdas untuk mengatasi masalah PKL. Dengan berpindah kelokasi yang tertata, nilai ekonomis akan meningkat secara signifikan tanpa mengorbankan harkat dan martabat warga masyarakat sebagai manusia yang beradab.

Alternatif Model Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta.

Dari Model Implementasi Kebijakan yang telah dimodifikasi dari Model Implementasi Kebijakan menurut Edward III dan Grindle, maka terciptalah Model Implementasi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta, sebagai berikut:

1. Memperbaiki pola komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan PKL.
2. Mempermudah upaya sosialisasi program Pemerintah Kota yang berkaitan dengan kebijakan masalah PKL.
3. Memberdayakan sumber daya yang ada untuk diberi wewenang lebih luas agar di dalam penataan dan pengelolaan akan mencapai tujuan yang telah ditargetkan.
4. Menggali informasi, menjalankan kerjasama, menampung, menginspirasi dan mewujudkan keinginan serta kebutuhan antara Pemerintah Kota Surakarta dan Paguyuban PKL Surakarta.

Daftar Pustaka

- Anderson, James E. 1997, *Publik Policy Making*, New York : Holt Reinhart and Winston
- Anderson, Jonathan, F, 2006, *The Rhetorical Impact of Evil on Publik Policy Administration & Society*; Jan 2006; 37, 6; ABI/INFORM Global ,pg. 719
- Almond, Gebriel A.G Bingham Powell Jr,1986, *Comparative Politics Today A World View*, Boston Litle Brown and Compan
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan: Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Blau, Peter M, and Meyer, Marshall, 2000, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta
- Caiden,G.E. 1991, *Administrative Reform Comes of Age*, New York, N.Y: de Gruyter
- D'Aprix, Roger, 1982, *Communicating for Productivity*. New York: Harper & Row.
- Devito, A. Joseph, 2006, *Human Communication Tenth edition*, Pearson Education. Inc.
- Dye, Thomas R., 1992, *Understanding Public Policy*, Prince Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, United State of America.

- Darwin, Muhadjir, dalam *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, (Riza Noer Arfani (Editor), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Dunn, William N, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- *Teori Administrasi, (Diktat Kuliah)*, Program Studi Magister Administrasi (MA), Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 1995.
- Edward III, George C, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC, 1980.
- Eade, D.,1998, Capacity Building: An Approach to People-Centered Development, Oxford, UK: Oxfam.GB
- Edralin, J.S., 1998, The New Lokal Governance and Capacity Building: 4 Strategic Approach Regional. Development Studies, Vol. 3
- Effendy, Uchjana. (2001). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fiszbein, A, 1997, The Emergence of Lokal Capacity: Lesson from Columbia World development, Vol. 25(7) hal 1029 – 1043
- Gareth Morgan dan Lina Smircich, 1980, "The Case for Qualitative Research," *Academy of Management Review*, 5 (Oktober 1980), 494-495. Copyright © 1980 oleh the Academy of Management. Dicitak ulang atas izin penerbit.
- Garfinkel, Harold, 1967, *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Goldhaber, Gerald M., 1979, *Organizational Communication*, ed.ke-2. Dubuque, Iowa: Wm.C.Brown.
- Gondokusumo,A.A. 1980, Komunikasi Penugasan, Jakarta, Gunung Agung Grindle,M.S. (editor), 1997, Getting Good Government: Capacity Building in the Publik Sector of Developing Countries, Boston, MA: Harvard Institute for International Development
- Hasan, Erliana, DR.,MSi. 2005, Komunikasi Pemerintahan, Aditama, Bandung
- Jones, Charles O, 1984, An Introduction to the Study of Publik Policy, Theird Edition Books/Cole Publishing Company, Californi
- Islamy, M. Irfan, 1998, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara Jakarta
- Katz, Daniel, dan Robert L. Kahn, *The Social Psychology of Organizations*. New York: John Wiley, 1966.
- Koentjaraningrat, 1984, Kebudayaan Jawa, Jakarta, Balai Pustaka
- Kreitner, Robert, 2005, Perilaku Organisasi buku 1, Salemba Empat, Jakarta, Perilaku Organisasi, buku 2, Salemba Empat, Jakarta
- Lawrence, Paul R., dan Jay W. Lorsch, 1969, *Organization and Environment* Homewood, III.: Richard D. Irwin.
- , 2004, Wacana Komunikasi Organisasi, Bandung, Mandar Maju
- Littlejohn.Stephen W, 2008, Theories of Human Communication, Thomson, USA
- Luthans, Fred, 1973, *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Masmuh, Abdullah, 2008, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek, Malang, UMM Press
- Morgan, Gareth, 1986, *Images of Organization*. Beveriy Hills, Calif.: Sage.
- Morgan, Gareth, dan Linda Smircich, "The Case for Qualitative Research," *Academy of Management Review*, 5 (Oktober 1980), 491-500.
- Muhammad, Arni, 2004, Komunikasi Organisasi, Jakarta, Bumi Aksara
- Nimmo, Dan, 1993, Komunikasi Politik (dua Jilid). Bandung: Remaja Rosda Karya

- Nugroho, Riant, 2008, *Publik Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Pace, Wayne R & Faules Dan F, 1993, *Komunikasi Organisasi, Strategi meningkatkan kinerja Perusahaan*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Parson, Wayne, 2006, *Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis kebijakan*, Jakarta, Kencana media
- Palumbo Dennis J., 1981, *Implementing Public Policy*, Lexington Books, D.C. Health and Company Lexington, Massachusetts, Toronto.
- Pal, Leslie A., 1988, *Public Policy Analysis: An Introduction*, Methuen, Toronto, New York, London, Sydney Auckland.
- Pool, Ithiel De Sola, "Communication Systems," dalam *Handbook of Communication*, Ithiel De Sola Pool dan Wilbur Schramm, ed. Skokie, 111.: Rand McNally, 1973.
- Postman, Neil, dan Charles Weingartner, *Teaching as a Subversive Activity*. New York: Delacorte Press, 1969.
- Putnam, Linda, 1983, "The Interpretive Perspective: An Alternative to Functionalism," dalam *Communication and Organizations: An Interpretive Approach*, Linda L. Putnam dan Michael Pacanowsky, ed. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1983.
- Redding, W. Charles, 1972, *Communication Within the Organization: An Interpretive Review of Theory and Research*. New York: Industrial Communication Council.
- Robbins Stephen, P, 2003, *Perilaku Organisasi* edisi kesepuluh, Jakarta Indeks
- Ruben, Brent D. 1988, *Communication and Human Behavior*, New York : Macmilland Publishing Company
- Ruslan, Rosady. 2005, *Kiat dan Strategi kampanye public relations*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Stogdill, Ralph M., 1966 "Dimension of Organization Theory," dalam *Approaches to Organizational Design*, James D. Thomson, ed. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Yogyakarta, Media Pressindo